



Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Pasir Bentang di Desa Sukamanah Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis

Muhamad Sopyan¹, Irfan Nursetiawan², Regi Refian Garis³

^{1,2,3}Universitas Galuh

E-mail: Muhamad_sopyan@student.ac.id¹; irfan_nursetiawan10@gmail.com²;
regirefiangaris@unigal.ac.id³

Abstract

This research is motivated by the role of the Village Government in developing the Pasir Span Tourism Object in Sukamanah Village, Sindangkasih District, which is not yet optimal. The aim of this research is to determine the role of the village government in developing the Pasir Bentang tourist attraction in Sukamanah Village. The method used in this research is descriptive analysis. There were 7 informants. Data collection techniques are literature study, field study (observation and interviews) and documentation. The author uses qualitative data analysis techniques by processing data from interviews and observations to draw conclusions so that they can answer the problems in the research. Based on the research results, it is known that: The village government has not optimally carried out its role in developing the Pasir Bentang tourist attraction considering that there are several indicators of the dimensions of the role that have not been optimal, causing the development of the Pasir Bentang tourist attraction to be less than expected. This includes, among other things, a lack of response from the community in activities. deliberations on planning the development of tourist attractions and the lack of an active role in managing tourist attractions. Budget limitations mean that it has not been optimal in structuring the Pasir Bentang tourist attraction. Apart from that, the collaboration between Pokdarwis and LMDH has not been able to increase the development of the tourist attraction due to the lack of clear authority in managing the tourist attraction. As well as the lack of encouraging community participation in realizing sustainability and cleanliness at the Pasir Bentang tourist attraction and not being supported by the availability of human resources who have an understanding of the concept of tourism management so that tourism promotion activities have not been carried out routinely.

Keywords: Role; Village Government; Development; Tourist Attractions.

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Peran Pemerintahan Desa dalam Pengembangan Obyek Wisata Pasir Bentang Desa Sukamanah Kecamatan Sindangkasih belum optimal. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek wisata Pasir Bentang di Desa Sukamanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Informan sebanyak 7 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan

observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: Pemerintah desa belum optimal melaksanakan perannya dalam mengembangkan objek wisata Pasir Bentang mengingat terdapat beberapa indikator dari dimensi peran yang belum optimal sehingga menyebabkan pengembangan objek wisata Pasir Bentang kurang sesuai dengan yang diharapkan hal ini antara lain kurang mendapat respon masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pengembangan objek wisata serta kurangnya peran aktif dalam mengelola objek wisata. Keterbatasan anggaran sehingga belum optimal dalam melakukan penataan objek wisata Pasir Bentang selain itu kerjasama yang terjalin antara pokdarwis dan LMDH belum dapat meningkatkan pengembangan objek wisata karena kurangnya kewenangan yang jelas dalam pengelolaan objek wisata. Serta kurangnya mendorong keikutsertaan masyarakat dalam mewujudkan kelestarian dan kebersihan di objek wisata Pasir Bentang serta belum didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman terhadap konsep pengelolaan wisata sehingga kegiatan promosi pariwisata belum dilaksanakan secara rutin.

Kata-kata kunci: Peran; Pemerintah Desa; Pengembangan; Objek Wisata.

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata dianggap sebagai sektor sampingan sehingga masih termarginalkan dan belum berkontribusi sesuai dengan yang diharapkan walaupun adanya sumberdaya yang memadai untuk dilakukan pengembangannya. Peran pariwisata sangat besar dalam pembangunan daerah karena dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan devisa maupun penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu peran dan kontribusi pariwisata sangat besar sehingga perlu adanya pengembangan secara berkelanjutan. Pengembangan pariwisata harus memperhatikan berbagai unsur baik masyarakat lokal maupun budaya setempat.¹

Era keterbukaan pada saat ini mendorong daerah untuk berkreasi dan melakukan inovasi untuk membuka investasi dan melakukan promosi terhadap daerah lain. Namun demikian walaupun era industrialisasi pariwisata menjadi sebuah keharusan tapi pariwisata mempunyai ciri khas yang menonjolkan ciri khas yang membedakannya dengan potensi wisata didaerah lain. Besarnya dampak pariwisata sehingga perlu ketepatan strategi dalam pengelolaannya termasuk ketersediaan berbagai fasilitas pelayanan dan melakukan penanganan yang melibatkan seluruh elemen secara komprehensif.²

Dukungan Undang-Undang Desa memberikan angin segar bagi pemerintah desa dalam mengelola potensi desa sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Begitupula halnya dengan masyarakat di Desa Sukamanah yang mendukung

¹ Helmi Aliansyah dan Wawan Hermawan, "Peran Sektor Pariwisata pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat," *Bina Ekonomi: Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan* 23, no. 1 (2019): 39–55, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/BinaEkonomi/article/view/4654>.

² Destha Titi Raharjana dan Heddy Shri Ahimsa Putra, "Penguatan SDM dalam e-Marketing untuk Promosi Desa Wisata di Kabupaten Malang," *Jurnal Nasional Pariwisata* 12, no. 2 (2020): 140–151, https://jurnal.ugm.ac.id/tourism_pariwisata/article/view/60403.

pemerintah desa dalam mewujudkan desa wisata yang diharapkan memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Sukamanah yang selama ini masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai buruh, sehingga dengan adanya pengembangan desa wisata diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Sukamanah.

Berikut data Wisatawan Pasir Bentang Tahun 2020-2023 dari hasil observasi peneliti sajikan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Wisatawan Pasir Bentang Tahun 2020-2023

No	Tahun	Jumlah Wisatawan	Keterangan
1	2020	867	
2	2021	904	
3	2022	1.432	
4	2023	1.894	

Sumber Data Wisatawan Pasir Bentang, 2023

Data tersebut di atas menunjukkan adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Pasir Bentang pada tahun 2020 sampai 2023, sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan karena pada tahun ini terjadi wabah *covid-19* dan pemerintah mengharuskan masyarakat lebih banyak melakukan aktivitas didalam ruangan, sedangkan pada tahun 2022 pemerintah sudah mulai membolehkan masyarakat melakukan aktivitas di luar ruangan sehingga mengalami sedikit peningkatan meskipun peningkatannya tidak begitu tinggi. Data pada tabel di atas sudah termasuk kunjungam pelajar atau mahasiswa, wisatawan nusantara maupun kunjungan dinas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas yang ada di Pasir Bentang dan juga wisatawan yang datang ke objek wisata Pasir Bentang diketahui bahwa wisatawan mengunjungi objek wisata Pasir Bentang karena tertarik pada pemandangan alam yang disuguhkan.

Oleh karena itu Pemerintahan Desa Sukamanah berupaya memanfaatkan potensi tersebut dengan melakukan pengembangan obyek wisata yang diharapkan dapat dijadikan desa wisata sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Ciamis Provinsi Jawa Barat Peraturan Bupati Ciamis Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Desa Wisata, yang menyatakan bahwa, “Desa Wisata berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat sehingga perlu adanya optimalisasi potensi desa.”³

³ Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, “Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 68 Tahun 2020 tentang Desa Wisata,” *JDIH Kabupaten Ciamis*, last modified 2020,

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga berbagai upaya dilakukan supaya penyelenggaraan pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakatnya.⁴

Pengembangan objek wisata di Desa Sukamanah telah sesuai dengan visi Desa Sukamanah yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Mandiri, Bermartabat, Religius dan Sejahtera. Oleh karena itu dalam pengembangan objek wisata maka Pemerintah Desa Sukamanah perlu melakukan promosi pariwisata.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa Pemerintahan Desa Sukamanah belum berperan secara optimal dalam mengembangkan Obyek Wisata Pasir Bentang, hal ini dibuktikan dengan beberapa indikator permasalahan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Sukamanah belum berperan selaku stabilisator dalam pengembangan objek wisata Pasir Bentang. Contohnya: Kurangnya pelibatan masyarakat Desa Sukamanah dalam perencanaan pengembangan objek wisata Pasir Bentang.
2. Pemerintah Desa Sukamanah belum berperan selaku inovator dalam pengembangan objek wisata Pasir Bentang. Contohnya: kurangnya pelibatan Pokdarwis untuk bekerjasama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam mengembangkan objek wisata Pasir Bentang di Desa Sukamanah.
3. Pemerintah Desa Sukamanah belum berperan selaku pelopor dalam pengembangan objek wisata Pasir Bentang. Contohnya: kurangnya kepedulian terhadap kebersihan dan pelestarian kealamiah objek wisata Pasir Bentang di Desa Sukamanah.⁵

Desa Pasir Bentang sendiri menjadi tempat rekreasi keluarga, menjadi tempat berkemah sembari menikmati kopi karena terdapat kedai di wisata Pasir Bentang. Namun yang menjadi persoalan dalam meningkatkan wisata ini adalah pemerintah desa belum bisa mengurus legalitas pariwisata ini sehingga belum bisa mendapatkan keuntungan bagi desa ini sendiri. Adapun hambatannya adalah belum adanya legalitas di tempat wisata ini diantaranya adalah terdapat potensi terjadinya konflik minat antara LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) dan kepentingan masyarakat desa. Keterlibatan LMDH yang

<https://jdih.ciamiskab.go.id/detail-produk-hukum/peraturan-bupati-ciamis-nomor-68-tahun-2020-tentang-desa-wisata>.

⁴ Lintang Prabowo dan M. Tenku Rafli, "Pengaruh Otonomi Daerah terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2020): 20–28, <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/56>.

⁵ Warga, "Hasil Wawancara dengan Warga di Desa Sukamanah" (Desa Sukamanah, 2024).

mungkin lebih fokus pada kepentingan lokal dari pada pembangunan desa secara keseluruhan dapat menghambat potensi pengembangan yang berkelanjutan.

Terdapat tiga bentuk peranan pemerintah menurut Elvia, antara lain:

1. Pemerintah awalnya berperan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban bahkan seringkali berfungsi sebagai penarikan pajak.
2. Selanjutnya pemerintah berperan sebagai *service state*, di mana pemerintah sebagai abdi sosial.
3. Kemudian pemerintah berperan sebagai *entrepreneur* untuk menginisiasi pembaharuan dan pembangunan masyarakat.⁶

Untuk melaksanakan peran pemerintah tersebut pemerintah desa sukamanah dituntut untuk dapat mengembangkan potensi desa untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul yaitu: **“Peran Pemerintahan Desa dalam Pengembangan Obyek Wisata Pasir Bentang Desa Sukamanah Kecamatan Sindangkasih”**.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁷ Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang sedang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁸ Informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang yang terdiri dari kepala desa, pokdarwis, LMDH dan perwakilan masyarakat.

⁶ Aiydra Vebronia, Kariena Febriantini, dan Dadan Kurniansyah, “Peran Dinas Pangan dalam Program Pekarangan Pangan Lestari (p2l),” *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 18, no. 4 (2021): 521–526, <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/view/9845>.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 18.

⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015),

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek wisata Pasir Bentang di Desa Sukamanah maka berikut ini penulis melakukan penelitian yang hasilnya sebagai berikut:

Peran Selaku Stabilator

Pemerintah adalah stabilisator yang menjaga stabilitas kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan melalui kebijakan-kebijakan yang disusun dan ditetapkan bersama stakeholder yang bisa dijadikan pedoman mengimplementasikan visi dan misi, program kerja dan aktivitas operasional dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka penetapan pokok-pokok pikiran sebagai suatu upaya untuk pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat akan lebih maju, sejahtera dan mandiri.⁹

Peran pemerintah desa selaku stabilisator dalam pengelolaan objek wisata Pasir Bentang melalui indikator Pemerintah Desa melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengembangan objek wisata Pasir Bentang sudah dilaksanakan melalui musyawarah yang dilaksanakan di desa namun belum dapat meningkatkan partisipasi masyarakat selain itu peran Pemerintah Desa dalam mendorong masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan potensi objek wisata Pasir Bentang belum optimal karena kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam mengembangkan objek wisata. Hal tersebut tidak sesuai dengan pernyataan bahwa: Pemerintah berperan sebagai pihak yang menjaga stabilitas dalam kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Hal ini dilakukan melalui perencanaan dan penetapan kebijakan bersama dengan para pemangku kepentingan, yang kemudian menjadi acuan dalam menerapkan visi dan misi, program kerja, serta kegiatan operasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan pembangunan.¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan perannya selaku stabilisator dalam pengelolaan objek wisata pasir bentang melalui pelibatan masyarakat dalam perencanaan pengembangan objek wisata serta mendorong masyarakat untuk mengelola objek wisata walaupun hal tersebut kurang mendapat respon dari masyarakat hal ini dibuktikan dengan rendahnya keikutsertaan

⁹ Wulan Novitasari dan Isnaini Rodiyah, "Mengungkap Hambatan Pembangunan Pedesaan untuk Memberdayakan Masyarakat di Indonesia," *IJPPR: ndonesian Journal of Public Policy Review* 25, no. 3 (2024): 1–16, <https://ijppr.umsida.ac.id/index.php/ijppr/article/view/1386>.

¹⁰ Eet Saeful Hidayat dan R. Didi Djadjuli, "Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Curug Kembar Desa Raksabaya," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 7, no. 2 (2020): 277–293, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/3643>.

masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pengembangan objek wisata serta kurangnya peran aktif dalam mengelola objek wisata.

Peran Selaku Inovator

Pemerintah desa secara nyata menjadi rule model dalam pembaharuan tata kehidupan yang bisa dicontoh oleh masyarakat. Pemerintah Desa secara keseluruhan bisa menjadi sumber-sumber ide baru terutama yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan agar lebih efektif dan mempercepat proses pembangunan.¹¹

Pemerintah desa telah melaksanakan perannya selaku innovator dengan melakukan pengembangan objek wisata Pasir Bentang dengan indikator Pemerintah desa secara bertahap melakukan penataan objek wisata Pasir Bentang dan Pemerintah desa melibatkan Pokdarwis untuk bekerjasama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam mengembangkan objek wisata Pasir Bentang walaupun belum optimal hal ini tidak lepas dari keterbatasan anggaran karena pemerintah desa hanya mengandalkan dana desa untuk melakukan penataan objek wisata sehingga belum dapat melakukan penyediaan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan pengunjung. Selain itu kerjasama yang terjalin antara pokdarwis dan LMDH hanya wacana karena kurang disertai dengan pemberian kewenangan yang jelas dalam mengembangkan objek wisata Pasir Bentang. Hal tersebut tidak sesuai dengan pernyataan bahwa: Peran pemerintah desa sebagai inovator, disini pemerintah memainkan peran sebagai keseluruhan menjadi sumber dalam menciptakan hal-hal baru yang tentunya bersifat inovatif ataupun juga pendekatan metode-metode baru yang diperlukan untuk upaya pemecahan masalah *problem solving* dan *action oriented*.¹²

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan perannya selaku innovator dalam mengembangkan objek wisata Pasir Bentang walaupun memang belum optimal karena keterbatasan anggaran sehingga belum optimal dalam melakukan penataan objek wisata Pasir Bentang selain itu kerjasama yang terjalin antara pokdarwis dan LMDH belum dapat meningkatkan pengembangan objek wisata karena kurangnya kewenangan yang jelas dalam pengelolaan objek wisata.

Peran Selaku Modernisator

Pemerintah Desa secara implisit memiliki tugas dan tanggungjawab membawa perubahan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik di segala bidang, kebijakan desa

¹¹ Heri Wahyudianto, "Model Desa di Masa Depan dan Kebijakan Pembinaannya," *Jurnal Inovasi Kebijakan* 4, no. 1 (2020): 47–57, <https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp/article/view/666>.

¹² Wibowo, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Menghadapi Tumbuhnya Generasi Milenial di Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0*, Cetakan 1. (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2022).

seharusnya menjadi jembatan untuk mengantarkan masyarakat desa menuju tata cara kehidupan modern.¹³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa belum berperan selaku modernisator dengan indikator Pemerintah Desa meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengelola objek wisata Pasir Bentang dan Pemerintah Desa menyampaikan target dalam pengembangan objek wisata Pasir Bentang walaupun belum dapat meningkatkan kemampuan pengelola dalam mengembangkan objek wisata hal ini tidak lepas dari kurangnya dilakukan kegiatan pelatihan bagi pengelola objek wisata walaupun Pemerintah Desa telah menyampaikan target dalam pengembangan objek wisata Pasir Bentang namun belum dapat tercapai sesuai target waktu hal ini tidak lepas dari keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di objek wisata sehingga belum dapat meningkatkan jumlah kunjungan yang datang ke objek wisata Pasir Bentang. Hal tersebut kurang sesuai dengan pernyataan bahwa: Peran pemerintah desa sebagai modernisator dalam mengembangkan objek wisata yaitu pemerintah desa bertugas untuk menggiring dan mengantarkan masyarakat ke arah yang menuju modernisasi dan turut meninggalkan pemikiran-pemikiran yang sudah tidak sesuai dengan kehidupan modern agar masyarakat dapat semakin maju dan berkembang.¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah desa sebagai modernisator dapat berkontribusi signifikan dalam mengembangkan objek wisata Pasir Bentang hal ini dikarenakan melalui peningkatan keterampilan pengelola objek wisata dapat berperan dalam meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan objek wisata. Selain itu Pemerintah Desa dapat menetapkan setiap target dalam pengembangan objek wisata sehingga pengelola memiliki tujuan yang harus dicapai secara jelas walaupun memang karena keterbatasan sarana dan prasarana menyebabkan objek wisata belum dapat berkembang secara optimal.

Peran Selaku Pelopor

Pemerintah desa seyogyanya memainkan peranan selaku pelopor dalam berbagai kehidupan bermasyarakat dalam melaksanakan program-program sesuai dengan prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa tidak

¹³ Sumarno, "Studi Literatur: Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan, Pembangunan dan Pengawasan Keuangan Desa," *Jurnal Kediklatan Widya Praja* 2, no. 1 (2022): 33–44, <https://jurnal.bpsdmd.jatengprov.go.id/index.php/jwp/article/view/34>.

¹⁴ Monica Dwipi Salam dan Ananta Prathama, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan UMKM," *Jurnal Kebijakan Publik* 13, no. 2 (2022): 137–143, <https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/8012>.

hanya menjalankan fungsi selaku perumus kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan saja, tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan yang kreatif dan inovatif yang mampu memecahkan berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada di desa.¹⁵

Hasil penelitian mengenai peran pemerintah desa melalui dimensi sebagai pelopor melalui indikator pemerintah Desa memiliki kepedulian terhadap kebersihan objek wisata Pasir Bentang dan Pemerintah Desa menjaga dan melestarikan kealamian objek wisata Pasir Bentang belum optimal mengingat dalam pelaksanaannya masyarakat kurang berperanserta dalam membantu pemerintah desa mewujudkan kelestarian dan kebersihan di objek wisata Pasir Bentang. Hal tersebut belum sesuai dengan pernyataan bahwa: Pada dasarnya peran pemerintah desa menjadi sangat penting sebagai penggerak utama dalam proses pembangunan yang akan memberikan semangat kepada perkembangan wilayah serta memberdayakan penduduknya. Oleh karena itu dalam melaksanakan peran pelopor maka pemberian contoh nyata dalam mendorong keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa.¹⁶

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah desa sebagai pelopor dalam pengembangan objek wisata Pasir Bentang belum optimal hal ini dikarenakan pemberian contoh yang dilakukan pemerintah desa belum mendorong keikutsertaan masyarakat dalam mewujudkan kelestarian dan kebersihan di objek wisata Pasir Bentang.

Peran Selaku Pelaksana Sendiri

Pembangunan harus diselenggarakan sendiri oleh pemerintah dimana pemerintah harus dapat memperhitungkan seluruh faktor yang berpengaruh dalam pembangunan, mengendalikan faktor negatif yang cenderung menjadi faktor penghambat sehingga dampaknya dapat diminimalisir dan dapat mengidentifikasi faktor yang menjadi pendorong pembangunan sehingga memberikan dampak yang optimal.¹⁷

Dengan demikian hasil penelitian mengenai peran pemerintah desa melalui dimensi pelaksana sendiri dengan indikator Pemerintah Desa telah memiliki tanggungjawab dalam mengembangkan objek wisata Pasir Bentang hal ini dibuktikan dengan adanya anggaran

¹⁵ Dwi Iriani Margayaningsih, "Peran Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa," *Publiciana* 11, no. 1 (2018): 72–88, <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/140>.

¹⁶ Dewi Sarah Simbolon et al., "Peranan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur," *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 295–302, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/1465>.

¹⁷ Hasmia, Muhammad Massyat, dan Sri Yuyun, "Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata di Desa Kayuangan untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD)," *Jurnal Peqquruang: Conference Series* 3, no. 2 (2021): 866–874, <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/peqquruang/article/view/2237>.

yang diberikan untuk kegiatan-kegiatan pengembangan objek wisata selain itu adanya kegiatan gotong royong yang melibatkan semua unsur di masyarakat untuk memperbaiki aksesibilitas menuju objek wisata namun demikian Pemerintah Desa dalam memanfaatkan media sosial dalam mempromosikan objek wisata Pasir Bentang belum didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman terhadap konsep pengelolaan wisata sehingga kegiatan promosi pariwisata belum dilaksanakan secara rutin. Hal tersebut belum sesuai dengan pernyataan bahwa: Pemerintah desa selaku pelaksana sendiri bukan hanya menjalankan fungsi selaku perumus kebijakan tetapi juga sebagai pelaksana yang mampu menunjukkan contoh-contoh nyata dan mendorong masyarakat untuk melakukan suatu hal yang dapat memberikan dampak positif. Artinya, untuk mengukur keberhasilan sejauh mana kemandirian suatu daerah, kesejahteraan masyarakatnya itu tergantung dari bagaimana pemerintah menjalankan peranan fungsi serta tanggung jawabnya dalam memimpin, mengatur serta menjalankan tugas-tugasnya.

Berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah desa melalui dimensi pelaksana sendiri belum optimal walaupun Pemerintah Desa telah memiliki tanggungjawab dalam mengembangkan objek wisata Pasir Bentang dengan adanya anggaran yang diberikan untuk kegiatan-kegiatan pengembangan objek wisata selain itu adanya kegiatan gotong royong yang melibatkan semua unsur di masyarakat untuk memperbaiki aksesibilitas menuju objek wisata namun demikian Pemerintah Desa dalam memanfaatkan media sosial dalam mempromosikan objek wisata Pasir Bentang belum didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman terhadap konsep pengelolaan wisata sehingga kegiatan promosi pariwisata belum dilaksanakan secara rutin sehingga keberadaan objek wisata belum menarik minat pengunjung.

Oleh karena itu dalam mengembangkan objek wisata pemerintah desa dapat lebih gencar melakukan pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan objek wisata selain itu melakukan pelatihan bagi pengelola objek wisata terkait dengan penggunaan teknologi informasi yang dapat digunakan untuk mempromosikan objek wisata Pasir Bentang.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa dalam melaksanakan perannya pemerintah desa belum optimal dalam mengembangkan objek wisata Pasir Bentang mengingat terdapat beberapa indikator dari dimensi peran yang belum optimal sehingga menyebabkan pengembangan objek wisata Pasir Bentang kurang sesuai dengan yang diharapkan hal ini antara lain:

- a. Walaupun pemerintah desa telah melaksanakan perannya selaku stabilisator dalam pengelolaan objek wisata Pasir Bentang dengan pelibatan masyarakat dalam

perencanaan pengembangan objek wisata serta mendorong masyarakat untuk mengelola objek wisata namun hal tersebut kurang mendapat respon dari masyarakat hal ini dibuktikan dengan rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pengembangan objek wisata serta kurangnya peran aktif dalam mengelola objek wisata.

- b. Walaupun pemerintah desa telah melaksanakan perannya selaku innovator dalam mengembangkan objek wisata Pasir Bentang walaupun memang belum optimal karena keterbatasan anggaran sehingga belum optimal dalam melakukan penataan objek wisata Pasir Bentang selain itu kerjasama yang terjalin antara pokdarwis dan LMDH belum dapat meningkatkan pengembangan objek wisata karena kurangnya kewenangan yang jelas dalam pengelolaan objek wisata.
- c. peran pemerintah desa sebagai pelopor dalam pengembangan objek wisata Pasir Bentang belum optimal hal ini dikarenakan pemberian contoh yang dilakukan pemerintah desa belum mendorong keikutsertaan masyarakat dalam mewujudkan kelestarian dan kebersihan di objek wisata Pasir Bentang
- d. Peran pemerintah desa melalui dimensi pelaksana sendiri dengan indikator Pemerintah Desa memanfaatkan media sosial dalam mempromosikan objek wisata Pasir Bentang belum didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman terhadap konsep pengelolaan wisata sehingga kegiatan promosi pariwisata belum dilaksanakan secara rutin.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Pasir Bentang di Desa Sukamanah Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, pemerintah desa belum optimal melaksanakan perannya. Terdapat beberapa indikator dari dimensi peran yang belum optimal, sehingga pengembangan objek wisata Pasir Bentang kurang sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun pemerintah desa telah melaksanakan perannya dalam pengelolaan objek wisata Pasir Bentang dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengembangan, serta mendorong mereka untuk mengelola objek wisata, partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pengembangan objek wisata masih rendah. Selain itu, keterbatasan anggaran dan kurangnya kerjasama antara pokdarwis dan LMDH juga menjadi hambatan dalam meningkatkan pengembangan objek wisata.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, penulis menyarankan pemerintah desa untuk memasukkan perencanaan pengembangan Objek Wisata Pasir Bentang dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Desa. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan dukungan anggaran dan kebijakan yang jelas, sehingga pengembangan objek wisata bisa lebih optimal. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan objek wisata Pasir Bentang akan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tujuan pengembangan, serta memungkinkan mereka untuk berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

REFERENSI

- Aliansyah, Helmi, dan Wawan Hermawan. "Peran Sektor Pariwisata pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat." *Bina Ekonomi: Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan* 23, no. 1 (2019): 39–55. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/BinaEkonomi/article/view/4654>.
- Hasmiati, Muhammad Massyat, dan Sri Yuyun. "Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata di Desa Kayuangan untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD)." *Jurnal Pegguruang: Conference Series* 3, no. 2 (2021): 866–874. <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/pegguruang/article/view/2237>.
- Hidayat, Eet Saeful, dan R. Didi Djadjuli. "Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Curug Kembar Desa Raksabaya." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 7, no. 2 (2020): 277–293. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/3643>.
- Margayaningsih, Dwi Iriani. "Peran Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa." *Publiciana* 11, no. 1 (2018): 72–88. <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/140>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015.
- Novitasari, Wulan, dan Isnaini Rodiyah. "Mengungkap Hambatan Pembangunan Pedesaan untuk Memberdayakan Masyarakat di Indonesia." *IJPPR: ndonesian Journal of Public Policy Review* 25, no. 3 (2024): 1–16. <https://ijppr.umsida.ac.id/index.php/ijppr/article/view/1386>.
- Prabowo, Lintang, dan M. Tenku Rafli. "Pengaruh Otonomi Daerah terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2020): 20–28. <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/56>.
- Raharjana, Destha Titi, dan Heddy Shri Ahimsa Putra. "Penguatan SDM dalam e-Marketing untuk Promosi Desa Wisata di Kabupaten Malang." *Jurnal Nasional Pariwisata* 12, no. 2 (2020): 140–151. https://jurnal.ugm.ac.id/tourism_pariwisata/article/view/60403.
- Salam, Monica Dwipi, dan Ananta Prathama. "Peran Pemerintah Daerah dalam

- Pengembangan UMKM.” *Jurnal Kebijakan Publik* 13, no. 2 (2022): 137–143.
<https://jke.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/8012>.
- Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis. “Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 68 Tahun 2020 tentang Desa Wisata.” *JDIH Kabupaten Ciamis*. Last modified 2020. <https://jdih.ciamiskab.go.id/detail-produk-hukum/peraturan-bupati-ciamis-nomor-68-tahun-2020-tentang-desa-wisata>.
- Simbolon, Dewi Sarah, Julita Sari, Yowisa Yolanda Purba, Nurtia Indah Siregar, Risa Salsabilla, dan Yohana Manulang. “Peranan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur.” *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 295–302.
<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/1465>.
- Sumarno. “Studi Literatur: Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan, Pembangunan dan Pengawasan Keuangan Desa.” *Jurnal Kediklatan Widya Praja* 2, no. 1 (2022): 33–44.
<https://jurnal.bpsdmd.jatengprov.go.id/index.php/jwp/article/view/34>.
- Vebronia, Aiydra, Kariena Febriantini, dan Dadan Kurniansyah. “Peran Dinas Pangan dalam Program Pekarangan Pangan Lestari (p2l).” *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 18, no. 4 (2021): 521–526.
<https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/view/9845>.
- Wahyudianto, Heri. “Model Desa di Masa Depan dan Kebijakan Pembinaannya.” *Jurnal Inovasi Kebijakan* 4, no. 1 (2020): 47–57.
<https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp/article/view/666>.
- Warga. “Hasil Wawancara dengan Warga di Desa Sukamanah,” 2024.
- Wibowo. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Menghadapi Tumbuhnya Generasi Milenial di Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0*. Cetakan 1. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2022.